

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PETANI GARAM DI KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

BUDI SUSANTO

Nomor Stambuk : 10564 00984 10



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PETANI GARAM DI KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Politik

Disusun dan Diajukan Oleh

Budi Susanto

No Stambuk : 10564 009 8410

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Di kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Budi Susanto

Nomor Stambuk : 10564 00984 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Idris, M.Si

Pembimbing II

Dr. Anwar Parawangi, M.Si

Mengetahui:

Dekan



Ir. H. Saleh Mollah, MM

Ketua Jurusan

Andiluhur Prianto, S. Ip, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh panitia ujian skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 1691/FSP/A1-VIII/IV/36/2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (SI) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari jum'at 24 Agustus tahun 2017.

TIM PENILAI

Ketua



Ir. H. Saleh Mollah, MM

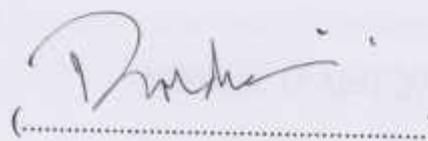
Sekretaris



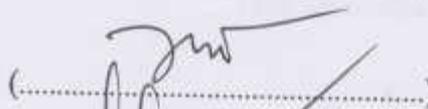
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

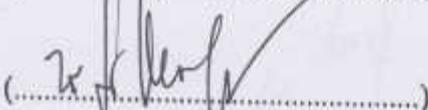
1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si


(.....)

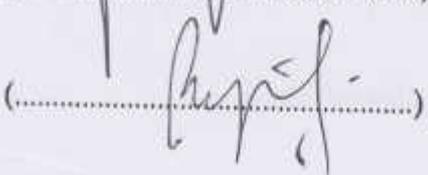
2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si


(.....)

3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si


(.....)

4. Handam, S.IP, M.Si


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Budi Susanto

Nomor Stambuk : 10564 00984 10

Program Studi : Ilmu Pemertintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 13 April 2016

Yang Menyatakan

Budi Susanto

ABSTRAK

BUDI SUSANTO. 105640098410. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Di kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. Dibimbing oleh MUHAMMAD IDRIS dan ANWAR PARAWANGI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan petani garam di kelurahan bontorannu kecamatan bangkala kabupaten jeneponto.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani garam yang ada di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dan faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan petani garam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peranan pemerintah dalam pemberdayaan petani garam dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Peranan pemerintah dalam pembinaan. Pembinaan kehidupan petani garam dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan dengan menggunakan konsep berbasis pertanian, kesadaran diri dan kemauan dari masyarakat itu sendiri. Peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada petani garam maka kontribusi yang sangat besar dalam bidang pertanian adalah aktivitas usaha tani. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa aparatur pemerintah belum sepenuhnya maksimal berperan dalam memberikan penyuluhan, pelayanan dan pelatihan tentang pemberdayaan kepada petani garam khususnya Di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Kata kunci: Peran Pemerintaah, Pemberdayaan Petani Garaam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Di Kelurahan Bonto Rannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto” penulisan ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Fisipol, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sekiranya dapat membangun demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 13 April 2017

Budi Susanto

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Persetujuan..... | ii |
| Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah | iii |
| Abstrak | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi..... | vi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 14 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Konsep Peran Pemerintah | 15 |
| B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat | 22 |
| C. Pemberdayaan Usaha Gram Rakyat..... | 31 |
| D. Kerangka Pikir | 39 |
| E. Fokus Penelitian | 40 |
| F. Deskripsi Fokus Penelitian..... | 41 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Waktu dan Lokasi penelitian | 42 |
| B. Tipe dan Jenis Penelitian | 42 |
| C. Sumber Data..... | 43 |
| D. Informan Penelitian..... | 43 |
| E. Tehnik Pengumpulan Data..... | 44 |
| F. Tehnik Analisis Data..... | 45 |
| G. Pengabsahan Data | 46 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Objek Penelitian | 47 |
| B. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Garam | 53 |
| C. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemberdayaan Petani Garam Di Kelurahan Bonto Rannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono .. | 66 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran..... | 71 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
|-----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku individu dalam keseharian hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga dimasyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya.

Organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.

Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia

berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat. Pentingnya pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan mekanisme pembangunan nasional yang menjadikan masyarakat pada akhirnya berperan sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut. Untuk itulah diperlukan payung hukum bagi penyelenggaraan sistem pembangunan nasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan spirit kebangsaan Indonesia yang tidak hanya dapat menjembatani konteks mikro ke dalam konteks makro tetapi juga sebaliknya menerjemahkan konteks makro ke dalam konteks mikro. Pentingnya memberikan mandat tentang keberpihakan pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan nasional yang memberikan peran aktif kepada masyarakat partisipatif.

Salah satu fokus kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial ini adalah dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan selain dari pada fungsi pembangunan dan fungsi pelayanan (M Ryaas dalam Darwanto,2003:15)

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat, 1997). Dalam memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Garam adalah komoditas strategis di Indonesia. Garam (wuyah) merupakan salah satu komoditas makanan dan bumbu-bumbuan yang dibawa para pedagang yang lebih profesional serta memiliki jangkauan yang lebih luas di Jawa (Rahardjo 2002:331; Nastiti 1995:88-89 dalam Sunjayadi, 2007). Hal ini dapat ditemukan dalam prasasti abad IX-XV Masehi, dimana garam merupakan salah satu komoditi yang diangkut oleh transportasi air. Dalam hal ini garam yang diperoleh dengan cara kuno erat kaitannya dengan proses pengawetan ikan (ikan asin) pada masa itu. Dilihat dari sejarah, produksi garam di Indonesia sebelum dikembangkannya pembuatan garam secara modern oleh Pemerintah Kolonial pada abad ke-19, hampir seluruhnya dikuasai orang Tionghoa. Pemerintah Kolonial lalu mengambil alih tambak-tambak garam besar yang terdapat di sekitar Gresik dan Sumenep (Madura) di Jawa Timur.

Pemeo “Ibarat sayur tanpa garam” seolah menggambarkan pentingnya penggunaan garam dalam masakan. Garamlah yang membuat makanan terasa

gurih. Garam dengan nama senyawa kimia sodium atau natrium chlorida (NaCl) yang merupakan bagian dari sodium yang sangat diperlukan tubuh. Tubuh memerlukan kandungan garam tertentu agar berfungsi dengan baik. Sodium membantu tubuh menjaga konsentrasi cairan di dalam tubuh. Garam ini juga berperan sebagai transmisi elektronik dalam saraf dan membantu sel-sel tubuh membentuk nutrisi.

Garam ternyata bukan hanya untuk dikonsumsi dan menggarami ikan asin. Sejak beberapa ratus tahun yang lalu garam merupakan bahan yang dapat digunakan untuk keperluan kesehatan dan penggunaannya semakin penting di era modern ini. Beberapa penggunaan garam bagi kesehatan adalah:

a. Minuman kesehatan.

Produk minuman kesehatan terutama dirancang sebagai produk minuman untuk mengembalikan kesegaran tubuh dan mengganti mineral-mineral yang keluar bersama keringat dari tubuh selama proses metabolisme atau aktivitas olah raga yang berat. Umumnya produk-produk minuman kesehatan selain mengandung pemanis dan zat aktif, juga mengandung mineral-mineral dalam bentuk ion seperti ion natrium (Na^+), kalium (K^+), magnesium (Mg^{++}), kalsium (Ca^{++}), karbonat – bikarbonat (CO_3^{2-} dan HCO_3^{2-}), dan klorida (Cl^-). Sumber utama untuk ion natrium dan klorida selain kristal garam juga larutan garam pekat. Laut mati di timur tengah merupakan sumber larutan garam pekat, sedangkan di Indonesia akan mulai dikembangkan PT garam dengan bahan baku

bittern yaitu larutan sisa penguapan dalam produksi garam konsumsi dan garam high grade.

b. Garam mandi

Dalam buku Harry's Cosmology, garam mandi didefinisikan sebagai bahan aditif (tambahan) untuk keperluan mandi yang terdiri dari campuran garam NaCl dengan bahan kimia anorganik lain yang mudah larut, kemudian diberi bahan pewangi (essential oils), pewarna, dan mungkin juga senyawa enzim. Garam mandi ini dirancang untuk menimbulkan keharuman, efek pewarnaan air, kebugaran, kesehatan dan juga menurunkan kesadahan air. Komponen utama garam mandi adalah garam NaCl yaitu sekitar 90% – 95%. Berdasarkan definisi di atas, maka jenis garam mandi dapat dibagi berdasarkan komposisi bahan penyusunnya yaitu hanya mengandung garam NaCl dan garam anorganik, mengandung garam NaCl dan garam anorganik plus essential oils, mengandung garam NaCl, garam anorganik, essential oil dan pewarna, atau mengandung garam NaCl, garam anorganik, essential oil, pewarna dan enzim. Kegunaan garam mandi secara umum sangatlah beraneka ragam, di antaranya adalah untuk membersihkan tubuh saat berendam, menumbuhkan suasana relaks, menurunkan rasa stres, dan sebagai sarana refreshing. Suasana relaks terutama akibat adanya campuran pewangi yang dipercaya dapat memengaruhi emosi serta suasana hati secara signifikan. Sedangkan fungsi khusus di bidang kesehatan terutama karena adanya garam NaCl adalah untuk melenturkan otot yang tegang, mengurangi rasa nyeri pada otot yang sakit, menurunkan gejala inflamasi (peradangan), serta menyembuhkan infeksi. Untuk fungsi kecantikan, garam mandi antara lain dapat

membantu menghaluskan kulit (cleansing), memacu pertumbuhan sel kulit sekaligus meremajakannya (rejuvenating). Garam mandi sekarang banyak digunakan di spa dan pusat pengobatan dengan sistem aromaterapi karena adanya kandungan essentials oils.

c. Garam konsumsi.

Garam dapur merupakan media yang telah lama digunakan untuk pemberantasan gangguan akibat kekurangan iodium (gaki), yaitu dengan proses fortifikasi (penambahan) garam menggunakan garam iodida atau iodat seperti KIO_3 , KI , NaI , dan lainnya. pemilihan garam sebagai media iodisasi didasarkan data, garam merupakan bumbu dapur yang pasti digunakan di rumah tangga, serta banyak digunakan untuk bahan tambahan dalam industri pangan, sehingga diharapkan keberhasilan program gaki akan tinggi. Selain itu, didukung sifat kelarutan garam yang mudah larut dalam air, yaitu sekira 24 gram/100 ml. Jenis garam lain yang kurang populer penggunaannya di Indonesia adalah salt low sodium (garam rendah natrium) merupakan garam dengan kandungan $NaCl$ yang lebih rendah daripada garam konsumsi biasa. garam ini mempunyai komposisi terdiri dari campuran $NaCl$, $MgCl_2$, dan KCl dengan perbandingan tertentu. penggunaan garam rendah natrium terutama ditujukan untuk penderita tekanan darah tinggi yang tidak diperbolehkan mengonsumsi garam dapur biasa.

d. Oralit.

Oralit merupakan produk kesehatan yang dikonsumsi saat mengalami diare. kandungan oralit yang utama adalah campuran antara $NaCl$ dengan gula (glukosa

atau sukrosa). fungsi oralit yang utama adalah menjaga keseimbangan jumlah cairan dan mineral dalam tubuh. oralit merupakan satu-satunya obat yang dianjurkan untuk mengatasi diare yang menyebabkan banyak kehilangan cairan tubuh. oralit tidak menghentikan diare, tetapi mengganti cairan tubuh yang hilang bersama tinja. dengan mengganti cairan tubuh tersebut, terjadinya dehidrasi dapat dihindarkan. Sebagai contoh komposisi oralit 200 antara lain mengandung : glukosa anhidrat 4,0 gram, natrium klorida 0,70 gram, natrium sitrat dihidrat 0,58 gram , kalium klorida 0,30 gram. sedangkan dalam keadaan darurat, kita bisa membuat air minum yang diberi campuran gula putih (sukrosa) dengan garam dapur. Kombinasi gula dan garam dapat diserap baik oleh usus penderita diare, karena ion natrium merupakan ion yang berfungsi allosterik (berhubungan dengan penghambatan enzim karena bergabung dengan molekul lain). selain itu, garam mampu meningkatkan pengangkutan dan meninggikan daya absorpsi gula melalui membran sel. gula dalam larutan nacl (garam dapur) juga berkhasiat meningkatkan penyerapan air pada dinding usus secara kuat (sekira 25 kali lebih banyak dari biasanya), sehingga proses dehidrasi tubuh dapat dikurangi/diatasi.

e. Cairan infus.

Dikenal beberapa jenis cairan infus yaitu cairan infus glukosa 5%, cairan infus nacl 0,9 % + kcl 0,3% atau kcl 0,6%, cairan infus natrium karbonat dan cairan infus natrium laktat. Cairan infus nacl adalah campuran aquabidest dan garam grade farmasetis yang berguna untuk memasok nutrisi dan mineral bagi pasien yang dirawat di rumah sakit.

f. Sabun dan sampo.

Sabun dan sampo merupakan bahan kosmetik yang digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci rambut. dan garam nacl merupakan satu bahan kimia di antara beberapa komposisi bahan dalam pembuatan sabun dan sampo.

Biasanya zat garam mineral terdapat pada minuman yang kita minum dan juga pada makanan yang kita makan. Beberapa kegunaan dan fungsi dari garam mineral :

1. Yodium/Iodium/I

Zat mineral yodium biasanya terdapat pada garam dapur yang tersedia bebas di pasaran, namun tidak semua jenis dan merk garam dapur mengandung yodium. Yodium berperan penting untuk membantu perkembangan kecerdasan atau kepandaian pada anak. Yodium juga dapat membatu mencegah penyakit gondok, gondong atau gondongan. Yodium berfungsi untuk membentuk zat tirosin yang terbentuk pada kelenjar tiroid.

2. Phospor/Fosfor/P

Fosfor berfungsi untuk pembentukan tulang dan membentuk gigi.

3. Cobalt/Kobal/Kobalt/Co

Cobalt memiliki fungsi untuk membentuk pembuluh darah serta pembangun

4. Chlor/Klor/Cl

Chlor digunakan tubuh kita untuk membentuk HCl atau asam klorida pada lambung. HCl memiliki kegunaan membunuh kuman bibit penyakit dalam lambung dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin.

5. Magnesium/Mg

Fungsi atau kegunaan dari magnesium adalah sebagai zat yang membentuk sel darah merah berupa zat pengikat oksigen dan hemoglobin.

6. Mangan/Mangan/Mn

Mangan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh kita dan sistem reproduksi.

7. Tembaga/Cuprum/Cu

Tembaga pada tubuh manusia berguna sebagai pembentuk hemo globin pada sel darah merah.

8. Kalsium/Calcium/Ca

Kalsium atau disebut juga zat kapur adalah zat mineral yang mempunyai fungsi dalam membentuk tulang dan gigi serta memiliki peran dalam vitalitas otot pada tubuh.

9. Kalium/K

Kalium kita butuhkan sebagai pembentuk aktivitas otot jantung.

10. Zincum/Zinc/Seng/Zn

Seng oleh tubuh manusia dibutuhkan untuk membentuk enzim dan hormon penting. Selain itu zinc juga berfungsi sebagai pemelihara beberapa jenis enzim, hormon dan aktifitas indera pengecap atau lidah kita.

11. Sulfur atau belerang

Zat ini memiliki andil dalam membentuk protein di dalam tubuh.

12. Natrium/Na

Natrium adalah zat mineral yang kita andalkan sebagai pembentuk garam di dalam

tubuh dan sebagai penghantar impuls dalam serabut syaraf dan tekanan osmosis pada sel yang menjaga keseimbangan cairan sel dengan cairan yang ada di sekitarnya.

13. Flour/F

Flour berperan untuk pembentuk lapisan email gigi yang melindungi dari segala macam gangguan pada gigi.

Permasalahan garam di Indonesia menjadi suatu polemik yang berkepanjangan. Luas lahan garam dan jumlah penduduk yang besar tidak menjadi jaminan keberhasilan industri garam di Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia masih harus mengimpor garam dari Australia dan India. Kebijakan impor garam ini otomatis menuai banyak kontroversi. Problematika garam ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bidang utama yaitu permasalahan dalam proses produksi, distribusi yang kompleks, serta hukum permintaan-penawaran (*demand-supply*) yang tidak seimbang.

Beberapa kisah petani garam ini menggambarkan betapa pahit dan getirnya kehidupan petani Indonesia, manakala tidak memperoleh perhatian perlindungan maupun dukungan dalam melakukan pekerjaannya di ladang garam maupun di kebun untuk petani yang bercocok tanam. Gambaran petani garam di Indonesia yang mengolah sekitar satu hektar lahan, jika bernasib baik akan menghasilkan garam sekitar satu ton. Namun harganya yang relatif murah, seperti pada suatu masa harga garam perkilo hanya Rp.100, maka dalam bentuk usaha bagi hasil petani yang bersangkutan hanya akan memperoleh sebesar Rp.50.000,

karena yang separuh dari penghasilan keseluruhan itu akan diberikan kepada pemilik lahan.

Penghasilan sebesar itu sebenarnya sudah terbilang bagus, karena ada saatnya harga garam anjlok, misalnya bila panen berlangsung pada bulan November. Kondisi serupa ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Harga garam tak pernah stabil, penyebabnya siapa lagi, kalau bukan ulah tengkulak yang masih bisa mematok harga seenaknya. Hambatan serupa ini yang menjadi salah satu kekhawatiran petani garam, sama halnya gelauan petani kelapa sawit yang sering mengiba-iba meskipun harus membeli pupuk dari tengkulak dengan harga yang sudah melambung dinaikkan.

Berdasarkan data yang di kumpul dari Kantor Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa jumlah petani garam di wilayah tersebut sebanyak 200 KK, dengan luas lahan sebesar 390 hektar. Rata-rata petani dapat menggarap sekitar dua hektar per KK. Meski mereka cukup mengandalkan air laut sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jelas dapat dibayangkan penghasilan mereka yang tidak seberapa itu, namun tetap saja ada keinginan untuk mempertahankan usaha serupa. Ketangguhan mempertahankan pilihan bentuk usaha sebagai petani garam, bisa saja lantaran pekerjaan lain tidak memberi peluang bagi mereka untuk sedikit mengubah bentuk usaha sebagai alternatif guna memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga yang semakin meninggi.

Pendataan potensi garam mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa keterbatasan sehingga menjadi masalah dalam kehidupan petani garam di Kelurahan Nasara', diantaranya:

1. Dari sisi permodalan kurang mendukung, lemahnya permodalan yang dimiliki menyebabkan petambak garam masih belum optimal dalam mengakses sumber permodalan dari bank maupun non-bank, sehingga petambak garam terjerat pada bakul, tengkulak dan juragan yang menghargai garamnya di bawah harga Standard nasional. Akibatnya kesejahteraan tidak dapat ditingkatkan.
2. Skala usaha masih kecil dalam Pengembangan usaha garam rakyat yang dilakukan oleh petani garam di Kabupaten Jeneponto. Demikian halnya dalam pengelolaan masih menggunakan teknik produksi garam yang masih tradisional dengan memanfaatkan sinar matahari yang dikenal dengan teknik evaporasi. Dengan demikian, diperlukan pengembangan jejaring agribisnis pada kelompok petani garam yang berdayaguna.
3. Teknologi masih cukup sederhana menjadikan produksi berkualitas rendah sehingga sangat peka terhadap guncangan pasar. Jenis kualitas produksi garam yang ada di Kabupaten Jeneponto pada umumnya termasuk ke dalam jenis KP 3 (standar kualitas garam terendah), ini tersebar di semua wilayah pesisir kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti bermaksud untuk mengangkat judul tentang **“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Di Kelurahan Bontoraannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani garam di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?
2. Faktor apa yang mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat petani garam di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani garam di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat petani garam di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang berjudul mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani garam di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto adalah:

1. Sebagai bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian ilmu sosial yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani garam di bidang ekonomi.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan masyarakat petani garam terutama di bidang ekonomi.
3. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk bisa lebih mandiri dan terus mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah

Pada dasarnya, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial, misalnya ibu, manajer, guru. Meski kata peran sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoritis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran.

Dalam hal perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi interaksional simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat diuji secara empiris.

Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi ketika seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang membawa pertentangan harapan.

Teori peran sangat berkaitan erat dengan sosialisasi. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Walau Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran. Robert Linton, (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut teori ini masyarakat dengan pemahaman tentang peran-peran secara otomatis akan lebih paham dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, karena segala sesuatu yang diajarkan dengan peran adalah salah satu faktor utama dalam mencapai kepuasan tersendiri bagi individu untuk menjalankan sebuah fungsi. Hal ini dikaitkan dengan bagaimana seorang individu atau masyarakat memahami apa yang dilakukan oleh agen sosialisasi. Oleh karena itu diperlukan peran yang aktif dalam proses pensosialisasian atas individu atau masyarakat agar tercapai keinginan yang disepakati.

Pemikiran John Wahlke, tentang teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik, membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan institusi menunjukkan bahwa aktor politik umumnya

berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Sedangkan ia mendiskripsikan peranan institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan segi-segi perilaku dalam peran yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain.

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga dimasyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya.

Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur

sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.

Keseluruhan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan penilaian sejauhmana fungsi seseorang atau bagian dalam usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai sebab akibat. Maka dari itu, peran Pemerintah Daerah sebagai lembaga organisasi pemerintah merupakan fungsi dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, dan untuk melaksanakan peranannya tersebut, pemerintah daerah harus melaksanakan fungsinya yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Kesejahteraan masyarakat haruslah diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dengan jalan mengelola segala potensi yang dimiliki, melalui sebuah manajemen dan penerapan konsep pengembangan yang strategis, salah satunya adalah dalam bidang pemberdayaan petani garam, sehingga kesenjangan ekonomi yang selama ini terjadi di masyarakat dapat teratasi.

Carlzon dan Macauley sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (1998:46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut : “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan tidaknya.” Sementara dalam sumber yang sama, mendefinisikan pemberdayaan upaya memberi keberanian dan kesempatan pada

individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment”, pada intinya diartikan sebagai berikut. “membentuk klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat diperlukan.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yang diutarakan oleh Ryaas Rasyid dalam Darwanto (2003:15). Ryaas membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu

sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan. Ndraha (2002:89) menyebutkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan.

Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan) ke steering (pengendalian). Fungsi sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu,

pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring dengan itu, hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka secara perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi kebutuhannya.

Peran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari kata *empowerment* (dari akar kata “*to empower*”) menurut kamus Bahasa Inggris (Webster dan Oxford) dapat diartikan dua yaitu pertama *to give power or authority to* (memberikan kekuasaan atau wewenang pada pihak lain); kedua *to give ability to or enable* (memberi kemampuan atau kesanggupan). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan, memandirikan dan menswadayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara utuh dan komprehensif guna meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kesenjangan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan meliputi penguatan individu anggota masyarakat dan juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai kebudayaan modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula dengan pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu (1) upaya ini harus terarah; (2) program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran; (3) menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Menurut Pranarka dan Priyono (1996:54) Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kecenderungan kedua menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Pemberdayaan yang dilaksanakan pada Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat ini sekaligus dua kecenderungan diatas.

Proses pertama dilaksanakan melalui sosialisasi, sedangkan proses yang kedua melalui pengalihan dana oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua kegiatan ini melibatkan secara aktif kelompok masyarakat yang akan diberdayakan sehingga pendekatan yang

digunakan dapat digolongkan secara *participatory approach*. Program pemberdayaan yang berhasil adalah hanya jika masyarakat yang diberdayakan itu pada akhirnya tidak lagi hidup berkekurangan dan bahkan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada pendapatan nasional.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005: 41). Menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap **pertama** *Penyadaran*, pada tahap penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu", prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu

(membangun "*demand*") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap **kedua** adalah *Pengkapasitasan*, atau memampukan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap **ketiga** adalah *Pemberian Daya itu sendiri*, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepas-pisahkan dengan konsep sentral, yaitu konsep *Power* (daya). Menurut Suriadi (2005: 54-55). Pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep power dapat ditelusuri dari empat sudut pandang/perspektif, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main), dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak ada yang menang dan kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat, seperti: masalah kelas, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental, menentang penindasan struktural.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi; atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan dari pada suatu aksi. Dalam konteks relasi negara dan masyarakat, maka ketidakberdayaan warga negara tidak bisa dilihat sebagai suatu "kodrat" melainkan harus dilihat sebagai hasil dari relasi kuasa.

Permasalahannya adalah apakah relasi kuasa yang berkembang memang memungkinkan suatu proses yang membuat masyarakat yang punya kekuatan

menjadi tidak punya kekuatan (dalam konteks negara demokrasi), atau apakah proses yang ada cenderung tidak menghilangkan kekuatan yang dimiliki masyarakat atau sebaliknya ? Selanjutnya, Himawan Pambudi (2003: 54) berpendapat bahwa pemberdayaan memiliki makna:

1. Pertama, pemberdayaan bermakna kedalam, berarti suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka. Suatu transformasi kesadaran bermakna tindakan untuk mengembangkan pendidikan politik, guna mengembangkan wacana alternatif, sehingga dominasi atau hegemoni negara bisa diatasi. Langkah-langkah ini dilakukan dengan maksud utama untuk:
 - a. Memungkinkan masyarakat secara mandiri (otonom) mengorganisasikan diri dan dengan demikian akan memudahkan rakyat menghadapi situasi-situasi sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
 - b. Memungkinkan ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya dengan memberikan semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat.
 - c. Memungkinkan diatasinya persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan yang menjadi cermin adanya kepercayaan kepada rakyat bahwa rakyat tidak perlu dimaknai sebagai sumber kebodohan, melainkan subjek pembangunan yang juga memiliki kemampuan.

2. Kedua, pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan-perubahan kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam arti ini bermakna sebagai *policy reform* yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat. Suatu upaya *policy reform* sudah tentu memiliki dua makna sekaligus. Makna kebelakang, berarti suatu bentuk koreksi (mendasar) atas kebijakan lama. Sedangkan makna kedepan adalah mendorong suatu proses dan skema baru agar pengambilan kebijakan tidak lagi menggunakan skema lama, melainkan menggunakan skema baru yang lebih memungkinkan keterlibatan masyarakat.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja serta kekuatan yang terletak pada setiap individu. Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan, orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan suatu keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

Sardlow (Adi, 2003:54) melihat berbagai pengetahuan yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Kata pemberdayaan mengesahkan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: *Pertama*, kecenderungan

primer. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar individu mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kedua proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyelesaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai sebuah proses. Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol

kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. (Rukminto Adi, 2002: 162-163) .

Himawan S. Pambudi, dkk(2003: 55-56), memberi cakupan terhadap aspek ketidakberdayaan rakyat, agar bisa memperlihatkan apa yang seharusnya menjadi orientasi dari pemberdayaan masyarakat tersebut:

- a. Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu rendah. Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, kesehatan, dan sebagainya.
- b. Masalah akses terhadap sumberdaya, sebagian masyarakat elit dan kelas menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi dan sebagian yang lain tidak memiliki akses dan termarginal.
- c. Masalah kesadaran, masyarakat umumnya percaya bahwa keadaan mereka berkaitan dengan nasib. Sebagai akibatnya, banyak masalah tidak bisa diselesaikan substansial dan cenderung diselesaikan dengan cara karikatif (bantuan karena belas kasihan).
- d. Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki keterlibatan yang sangat kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri.
- e. Masalah kapasitas untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan berbagai relasi yang ada.

C. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)

PUGAR adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Usaha Garam rakyat dan bantuan pengembangan usaha dalam menumbuhkan usaha garam rakyat sesuai dengan potensi desa. Ditinjau dari aspek historis PUGAR merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional yaitu prioritas nasional ke-4 tentang penanggulangan kemiskinan. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah program untuk peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja petani garam rakyat dan pelaku usaha garam rakyat lainnya dalam mendukung swasembada garam nasional (Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, 2012).

Kegiatan PUGAR dalam rangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) dilaksanakan melalui tahap *bottom-up*, artinya masyarakat sendiri yang merencanakan kegiatan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Oleh sebab itu, sesuai instruksi Presiden RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, pelaksanaan kegiatan PUGAR mendapat perhatian dari Unit Kerja Presiden bidang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP- 4). Kegiatan kebijakan PNPM PUGAR mengacu pada 15 Indikator Output PNPM Nasional sebagaimana Pedoman Pelaksanaan (Pedlak) PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas peningkatan pada kualitas produksi dan

produktivitas di tingkat lahan tambak garam (*on farm*) melalui kapasitas penguatan petambak garam rakyat yang didukung dengan implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG).

Program pengentasan kemiskinan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sebagai bentuk representasi dari tujuan nasional bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan serta pertumbuhan. wirausaha kelautan dan perikanan.

Kegiatan PUGAR pada tahun 2011 dilaksanakan di 40 Kabupaten/Kota pada 10 Propinsi dengan jumlah penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebanyak 1 728 Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang terdiri dari 16 399 Petani garam rakyat yang tersebar di 241 desa pesisir termasuk didalamnya desa Nasara' pada 90 kecamatan. PUGAR merupakan salah satu Program Prioritas Pembangunan Nasional yaitu sebagai Prioritas Nasional Ke-4 tentang penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan PUGAR 2012 mendapat perhatian dari Unit Kerja Presiden Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UPK-4) sesuai instruksi Presiden RI Nomer 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 (Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, 2012). Dalam rangka peningkatan Produksi dan kualitas garam menuju swasembada garam, diharapkan tercapaiannya sasaran kegiatan PUGAR 2012 yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna di Tujuh kabupaten sentra garam rakyat dan 33 kabupaten/kota

penyangga garam pada Sembilan provinsi (Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, 2012).

Kegiatan kebijakan PNPM PUGAR mengacu pada beberapa Indikator Output PNPM Nasional sebagaimana Pedoman Pelaksanaan (Pedlak) PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas peningkatan pada kualitas produksi dan produktivitas di tingkat lahan tambak garam (*on farm*) melalui kapasitas penguatan petambak garam rakyat yang didukung dengan implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG). Penguatan koperasi, peningkatan partisipasi, tata kelola, pengarusutamaan gender, dan dukungan pemerintah daerah.

1. Prinsip PNPM PUGAR

Terdapat enam prinsip pemberdayaan yang harus menjadi acuan dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri , yakni:

a. Fasilitas/pendampingan

Fasilitas PNPM Mandiri KP dilakukan oleh tenaga pendamping mulai dari (1) mengidentifikasi/menumbuhkan kelompok, (2) memfasilitasi kelompok dalam menyusun RUB, (3) melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis/manajemen usaha selama kegiatan usaha berlangsung, dan (4) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

b. Partisipasi Komunitas

Dari sisi perencanaan, seluruh unsur dalam kelompok dengan difasilitasi tenaga pendamping partisipasi penyusunan sesuai kebutuhan yang diinginkan kelompok dalam pengembangan usaha dengan memperhatikan kelayakan usaha dan potensi desa. Pengawasan, seluruh anggota kelompok melakukan

pengawasan bersama melalui pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas perkembangan usaha dan pengelolaan keuangan.

c. Pengorganisasian Kelompok

Petani garam yang telah terbentuk memperoleh penguatan pengelolaan kelembagaan kelompok, manajemen keuangan dan bimbingan teknis pergamaan untuk memenuhi kebutuhan bersama.

d. Transparansi

Pertanggungjawaban keuangan kelompok difasilitasi oleh tenaga pendamping dilakukan melalui laporan/pemanfaatan BLM dan laporan perkembangan usaha yang secara berkala dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kabupaten/Kota dan Direktorat Jendral KP3K dengan tembusan dinas provinsi.

e. Sistem Pengawasan

Penggunaan dana kelompok dan perkembangannya dikontrol secara bersama oleh seluruh anggota kelompok.

f. Perspektif Gender

Mulai dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan melibatkan peserta perempuan dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping.

2. Tujuan PNPM PUGAR

Tujuan utama dari PNPM PUGAR adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia terutama pada petani garam. Secara khusus PNPM PUGAR bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat melalui implementasi Teknologi Ulir Filter (TUF), dan/atau teknologi geomembran/isolator, serta Unit Pengolahan Garam (UPG);
- b. Meningkatkan pendapatan petani garam rakyat;
- c. Menguatkan usaha KUGAR dengan memfasilitasi kemitraan atau jejaring usaha dan pemasaran garam rakyat;
- d. Memberdayakan perempuan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan termasuk dalam hal pengambilan keputusan;
- e. Mengoptimalkan sarana dan prasarana produksi, dan pengolahan garam rakyat;
- f. Menginisiasi, memberdayakan, dan meningkatkan peranan korporatisasi (koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa/BUMD) rakyat di tingkat desa.

3. Kelompok Sasaran PNPM PUGAR

Penentuan sasaran dari kebijakan PNPM PUGAR ini berdasarkan pada musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat, PNPM PUGAR ini secara umum berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani garam. Oleh karena itu, sasaran kebijakan PNPM PUGAR adalah petani garam yang berada di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

4. Penggunaan Dana PNPM PUGAR

KUGAR membelanjakan, mengelola dan memanfaatkan BLM sesuai dengan kebutuhan dalam RUB di dukung dengan tertib administrasi, meliputi pencatatan/pembukuan, bukti-bukti pembelanjaan dan keabsahannya, dan tepat

dalam penggunaan di bawah bimbingan/pembinaan dan pendampingan dari dinas kabupaten/kota.

5. Dasar Hukum PNPM PUGAR

Dasar hukum PNPM PUGAR adalah Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 2011 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.

Fokus PUGAR terarah pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi petambak garam dan terdapat empat strategis yang menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan petani garam yaitu (Ambar, 2004:91) :

1. Peningkatan pengetahuan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh petani garam dalam mengolah dan berbisnis garam menjadi faktor utamarendahnya kuantitas dan kualitas garam, maka dari itu sangat diperlukan pengetahuan tentang cara bertani garam yang benar agar dapat menghasilkan garam yang lebih berkualitas dan bernilai jual tinggi di masyarakat.
2. Permodalan yang menyebabkan para petambak garam terutama dalam kategori kecil dan penggarap terjerat pada bakul, tengkulak dan juragan;
3. Tata niaga garam rakyat yang sangat liberalistik dengan tidak adanya penetapan standar kualitas dan harga dasar garam rakyat, sehingga terjadi devisiasi harga yang sangat tinggi ditingkat produsen petembak garam dan pelaku pasar.

Berdasarkan isu stategis yang ada, maka tujuan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah:

1. Memberdayakan kelembagaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat petani garam untuk pengembangan kegiatan usahanya.
2. Meningkatkan kemampuan usaha kelompok masyarakat petani garam.
3. Meningkatkan akses kelembagaan masyarakat petambak garam kepada sumber permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat petani garam.
5. Terbentuknya sentra-sentra usaha garam rakyat di lokasi sasaran baru.
6. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan *stakeholder* terkait.
7. Meningkatkan kualitas garam rakyat.

Garam rakyat merupakan kegiatan pembuatan garam yang dilakukan oleh rakyat sebagian besar masyarakatnya membuat garam dan bahkan sudah menjadi rutinitas tahunan yang menjadi mata pencaharian yang menunjang untuk kehidupan setiap harinya. Produksi garam rakyat menjadi mata pencaharian utama pada saat musim kemarau melanda. Produksi garam sangatlah membantu perekonomian rakyat.

Mata pencaharian masyarakat terkait dengan lingkungan sekitar masyarakat itu sendiri, alam sekeliling memberikan kemungkinan-kemungkinan pada masyarakat pekerjaan yang dapat atau bisa memanfaatkan alam sekitar. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan alam yaitu petani garam, dengan bantuan sinar matahari petani garam membuat garam. Pembuatan garam tidak membutuhkan

peralatan atau teknologi yang canggih, namun dalam pembuatan garam petani hanya membutuhkan sinar matahari dan lahan.

Pemerintah telah mencoba berbagai macam cara untuk mengatasi permasalahan yang dialami industri garam di Indonesia. Beberapa kebijakan telah dibuat namun belum bisa menjadi solusi yang permanen untuk problematika industri garam di negara ini. Teknologi informasi dan komunikasi (selanjutnya disebut TIK) merupakan satu cara ampuh yang bila diterapkan dengan baik bisa menyelesaikan permasalahan industri garam nasional yang ada. Sebelum implementasi TIK, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu mengenai garam dan memantau seberapa besar kebutuhan garam dalam negeri. Proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri.

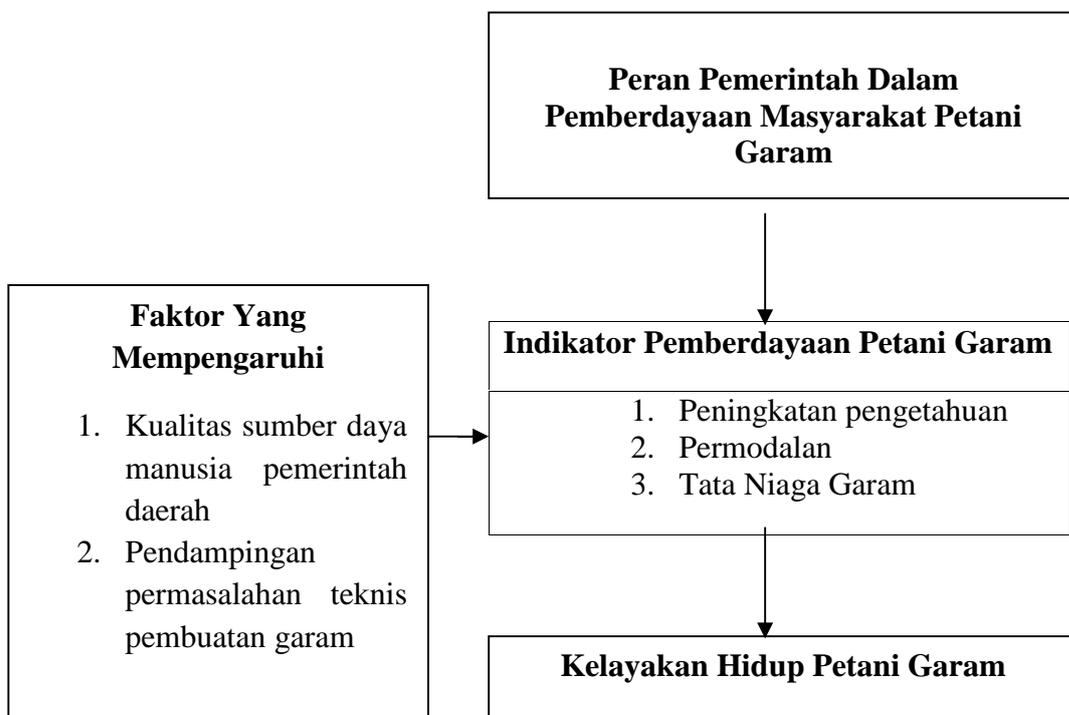
Para pengusaha dan petani garam harus bekerja sama dengan pemerintah secara terintegrasi. Hal ini membutuhkan rekayasa dari pemerintah sebagai regulator, sekaligus eksekutor yang memiliki kuasa dalam politik dan perekonomian nasional. Perlu adanya sinergi antara lembaga pemerintah sendiri, misal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah dan DRPD Kabupaten sentra garam, dan semua pihak yang terkait dengan pengambilan kebijakan serta eksekusi rantai produksi, distribusi, serta konsumsi garam nasional, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri.

D. Kerangka Pikir

Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan, kegiatan pemberdayaan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial dan budayanya.

Adapun strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat petani garam berpatokan dari beberapa indikator yaitu (1) Peningkatan pengetahuan yang sangat diperlukan petani garam agar bisa menghasilkan garam dengan kuantitas dan kualitas yang baik; (2) Permodalan yang menyebabkan para petambak garam terutama dalam kategori kecil dan penggarap terjatuh pada bakul, tengkulak dan juragan; (3) Tata niaga garam rakyat yang sangat liberalistik dengan tidak adanya penetapan standar kualitas dan harga dasar garam rakyat, sehingga terjadi deviasi harga yang sangat tinggi di tingkat produsen petambak garam dan pelaku pasar, serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam di tingkat lokal. Dari berbagai indikator pemberdayaan tersebut tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Untuk memudahkan pemahaman dari penjelasan di atas maka penulis merumuskan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut :

BAGAN KERANGKA PIKIR



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan) sebagai pelaksana pemerintahan Kabupaten Jenepono di bidang Kelautan dan Perikanan serta pengambil kebijakan yang ada di daerah Jenepono dalam pemberdayaan masyarakat petani garam. Hal ini

dapat di ukur dari beberapa indikator Pelaksanaan pemberdayaan petani garam berupa kegiatan atau program.

2. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani garam Seperti masih kurangnya Pengetahuan, Permodalan, dan Tata niaga garam.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Peningkatan pengetahuan sangat diperlukan petani garam agar para petani garam di Kelurahan Bontorannu bisa mengetahui cara mengelolah garam dengan benar, cara berdagang garam yang baikserta cara pemasaran yang lebih luas agar bisa meningkatkan kualitas hidup petani garam.
2. Permodalan yang menyebabkan para petambak garam terutama dalam kategori kecil dan penggarap terjerat pada bakul, tengkulak dan juragan, sehingga perlu adanya bantuan pemodalan kepada petani garam agar mereka mampu memulai usaha mereka.
3. Tata niaga garam rakyat yang sangat liberalistik dengan tidak adanya penetapan standar kualitas dan harga dasar garam rakyat, sehingga terjadi deviasi harga yang sangat tinggi di tingkat produsen petambak garam dan pelaku pasar, serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam di tingkat lokal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 bulan. Penelitian ini di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dan khususnya pada Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Petani garam Kelurahan Bontorannu.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani garam di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dan faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan petani garam. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data mengizinkan evaluator menggabungkan kekuatan dan kebenaran dari suatu sumber data.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog (wawancara)

kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan, kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto, serta Petani garam Kelurahan Bontorannu yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dalam penelitian.
2. Data sekunder adalah data-data yang di peroleh dari buku-buku, dokumen dan literatur serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun dari luar yang mendukung dan berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang menjadi informan peneliti adalah :

Tabel 1. Informan Penelitian

| No. | Informan | Jumlah |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Orang |
| 2 | Lurah Bontorannu | 1 Orang |
| 3 | Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) | 2 orang |
| 4 | Petani garam | 4 Orang |
| Jumlah | | 8 Orang |

E. Teknik Pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer yang mendukung pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan penulis Kepala dan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto serta petani garam di Kelurahan Bontorannu yang berhubungan dengan penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan menggantinya dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti mengkaji sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan

Pemberdayaan perempuan dan tentang penyandang disabilitas termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku tentang disabilitas. Dokumen-dokumen di atas digunakan untuk memperoleh data.

F. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan diskripsi kualitatif sebagai metode analisis data. Adapun yang dimaksud dengan metode diskripsi adalah suatu cara mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedangkan pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada di tempat diselenggarakannya penelitian.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun berupa informasi yang sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi data dan sajian data.

G. Pengabsahan Data

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik seperti ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahaan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidak akuratannya. Penelitian ini dilakukan secara interview yaitu dengan cara melakukan suatu penelitian secara langsung dan dapat wawancara langsung pada sumber penelitian.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis

a. Batas Wilayah

Kelurahan Bontorannu merupakan salah satu kelurahan dari kecamatan bangkala di kabupaten Jeneponto dan berbatasan dengan Kab. Gowa di sebelah utara, kecamatan Tamalatea sebelah timur, Kab Takalar sebelah Barat dan Kecamatan Laut flores sebelah selatan.

Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa/kelurahan ibu kota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa/kelurahan ke Ibukota kecamatan maupun ke Ibukota kabupaten berkisar 1-54 km. Untuk jarak terjauh desa Pappalluang yaitu sekitar 54 km dari Ibukota Kabupaten (Bontosunggu), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Banrimanurung kurang lebih 36 km dari ibukota Kabupaten. Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala terdiri dari 3 lingkungan yaitu kassi kebo, Narasa dan Tanetea dengan luas wilayah 805,45 ha.

b. Keadaan Iklim

Curah hujan di wilayah Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada umumnya tidak merata, hal ini menimbulkan adanya wilayah daerah basah dan wilayah semi kering. Curah hujan di Kabupaten Jeneponto yang tertinggi tahun 1999 jatuh pada Bulan Januari sedangkan curah

hujan terendah atau terkering terjadi pada Bulan Juni, Agustus, September dan Oktober.

Ditinjau dari klasifikasi iklim maka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa type iklim, type iklim tersebut adalah :

- a. Type iklim D3 dan Z4 yaitu wilayah memiliki bulan kering secara berurutan berkisar 5 – 6 bulan sedangkan bulan basah 1 – 3 bulan.
- b. Type iklim C2 yaitu wilayah memiliki bulan basah 5 – 6 bulan dan bulan lembab 2 – 4 bulan.

2. Pemerintahan di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

a. Aparat Pemerintah

Kegiatan pemerintah di kecamatan Bangkala dilaksanakan oleh sejumlah aparat/pegawai negeri yang berasal dari berbagai dinas/instansi pemerintah yang jumlah 96 orang, terdiri atas 74 orang laki-laki dan 22 orang perempuan.

b. Perkembangan Desa/Kelurahan

Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di kecamatan Bangkala tahun 2008 terdiri dari 6 desa/kelurahan dengan klasifikasi swakarya dan 4 desa kelurahan lainnya tergolong swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi desa/kelurahan yang termasuk swadaya..

c. Lembaga/Organisasi Tingkat Desa

Lembaga dan organisasi tingkat desa/kelurahan yang terbentuk di Kecamatan Bangkala dengan sejumlah anggotannya diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan. Organisasi LPD, BPD, P3A dan PKK masing-masing terdapat 1 unit pada setiap desa/kelurahan sedangkan organisasi

keagamaan seperti remaja mesjid sekitar 31 kelompok dan pondok pengajian sekitar 12 kelompok.

3. Karakteristik Obyek Penelitian

a. Jenis kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin maka pada dasarnya laki-laki masih memiliki peranan besar dibandingkan wanita, Kondisi ini berkaitan langsung dengan posisi laki-laki yang menjalankan usaha ini secara turun temurun. Alasan sebagian responden menggeluti profesi ini yaitu selain mampu menghasilkan pendapatan pribadi, juga menambah pendapatan keluarga. Dari 4 responden petani garam , 4 atau 100% adalah laki-laki dan 0% adalah wanita.

Tabel 2. Distribusi Persentase Responden Petani Garam di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Menurut Jenis Kelamin

| Jenis kelamin | Frekuensi | Persentase |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Laki laki | 100 | 100 % |
| Wanita | 0 | 0% |
| Jumlah | 100 | 100% |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2015.

b. Usia Kerja Petani Garam

Pada umumnya usia petani garam akan bersentuhan langsung dengan kemampuan fisik seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha. Dengan demikian semakin bertambah usia seseorang pada waktu tertentu akan mengalami penurunan waktu produktivitas terbaiknya. Tabel dibawah ini menjelaskan bahwa umumnya di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, petani garam berada pada usia sangat produktif yakni antara usia pekerja 15-63 tahun.

Petani garam di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto sekitar 2 atau 50% berada pada usia antara 36-45 tahun dari responden. Sedangkan sebanyak 1 orang atau 25% dari responden berada di usia antara 26-35 tahun dan untuk usia 15-25 tahun 1 orang responden atau sebesar 25%. Gambaran ini menunjukkan bahwa umumnya Petani Garam di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto berada pada rentan usia produktif. Asumsi yang dapat ditarik dari pemaparan tersebut adalah bahwa jika salah satu indikator peningkatan pendapatan adalah faktor usia pekerja maka kemungkinan pendapatan mereka akan meningkat.

Tabel 3. Distribusi Persentase Responden Petani Garam Di Desa Narasa Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Menurut Usia Petani Garam.

| No | Umur | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------|-----------|------------|
| 1 | 15 – 25 | 1 | 25 |
| 2 | 26 – 35 | 1 | 25 |
| 3 | 36 – 45 | 2 | 50 |
| Jumlah | | 4 | 100 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2015.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan akan berkaitan dengan pola pikir petani. Namun demikian untuk kegiatan pengelolaan tambak garam tidak berdampak sangat signifikan, hal ini berkaitan baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung terhadap jenis pengelolaan tambak garam yang mereka lakukan karena bisa bekerja. Tingkat pendidikan sendiri baru akan terlihat pada sistem manajemen pengolahan tambak garam untuk mampu menghasilkan garam baik secara jumlah maupun mutu yang mereka lakukan diikuti dengan pengalaman pengelolaan tambak garam yang mereka dapatkan. Dan untuk meningkatkan hasil didapat para

petani garam juga harus ditunjang oleh tingkat pendidikan, dan Tabel 4 adalah tabel pendidikan petani garam.

Tabel 4. Distribusi Presentase Responden Petani Garam di Kelurahan Bonntorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Menurut tingkat pendidikan.

| NO | NAMA | UMUR | TINGKAT PENDIDIKAN | KETERANGAN |
|----|------------|--------|--------------------|------------|
| 1 | SARIPUDDIN | 43 THN | SD | TIDAK |
| 2 | NYAMPA | 41 THN | SD | TIDAK |
| 3 | RUDDIN | 24 THN | SMP | TIDAK |
| 4 | RASYID | 28 THN | SD | TAMAT |

Di Kabupaten Jeneponto umumnya yang memasuki pekerjaan sebagai petani pemilik penggarap dan atau petani penggarap penggaraman adalah yang berpendidikan tidak tamat Sekolah Dasar sebanyak 3 responden, untuk responden yang tidak tamat SMP berjumlah 1 orang responden.

Alasan utama mereka memasuki pekerjaan ini adalah karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang telah dikerjakan secara turun temurun dalam keluarga serta karena semakin sempitnya lahan pekerjaan dan sulitnya berkompetensi di lapangan usaha yang menuntut untuk memiliki keahlian dan tingkat pendidikan yang tinggi dalam bekerja.

d. Status Tenaga Kerja

Status tenaga kerja berkaitan dengan tenaga kerja yang petani gunakan, apakah menggunakan tenaga kerja yang berasal dari keluarga atau tenaga kerja yang berstatus buruh. Pengalaman kerja merupakan hal yang paling penting dalam mempengaruhi pendapatan para petani, hal ini dilihat dari pengalaman kerja petani yang mempunyai peranan penting dalam menentukan seberapa besar pendapatan petani garam yang mereka peroleh setiap kali panen.

Untuk Petani Garam di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, pada umumnya mereka bekerja sendiri tanpa bantuan dari anggota keluarga dalam melakukan proses pengolahan garam, dimana sebanyak 4 orang responden berstatus bekerja sendiri.

e. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu.

Pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang petani garam secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh kepada hasil produksi dan pendapatan petani garam itu sendiri. Semakin lama seorang petani bekerja dalam pengelolaan penggaraman mempunyai peluang yang besar untuk menghasilkan produksi dan pendapatan yang lebih baik. Jika kita bandingkan dengan petani garam yang memiliki pengalaman 1 – 10 tahun akan berbeda dengan petani garam yang telah bekerja di atas 11 tahun. Baik di segi pengelolaan modal usaha, waktu yang digunakan untuk mengelola lahan penggaraman dalam

sehari, tingkat produktivitas yang dimiliki dan keterampilan tentunya berbeda hal ini akan berpengaruh pula pada seberapa besar pendapatan yang akan mereka peroleh.

B. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Garam Di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Di Kelurahan Bontorannu pemerintah berperan dalam Pemberdayaan berbasis kebijakan pertanahan agar para petani penggarap ini tidak terkungkung dalam lingkaran modal yang tidak berujung. Sebagaimana dibahas di depan bahwa lahan atau tanah adalah variabel yang penting, maka upaya untuk melakukan pemberdayaan kepada petani penggarap dengan mendasarkan pada kebijakan pertanahan adalah hal penting.

Pendekatan pertama, dalam upaya pemberdayaan petani penggarap garam berbasis pertanahan adalah pendekatan peningkatan produktivitas. Sebagaimana diketahui bahwa lahan untuk memproduksi garam tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu waduk atau bozem, peminihan dan meja kristalisasi atau biasa dinamakan meja garam. Luasan untuk bozem ini memerlukan sekitar 27% dari luas lahan dan sisanya untuk pemihan dan meja garam. Bila petani penggarap mengelola lahan garam seluas 1 ha maka ada 2750 m² yang digunakan untuk bozem dan hanya 7250 m² yang digunakan untuk peminihan dan meja kristalisasi. Jika terdapat integrasi bozem terpadu yang dapat digunakan oleh banyak petani penggarap maka akan meningkatkan jumlah penggunaan lahan untuk peminihan dan meja kristalisasi garam, sehingga jumlah produksi meningkat.

Pendekatan kedua, dalam upaya pemberdayaan petani penggarap garam berbasis pertanahan adalah pendekatan efisiensi biaya. Dimana para petani garam pada saat panen langsung memberikan kepada pengepul (tengkulak), selain petani garam juga dapat menghemat biaya yang cukup besar apabila hasil produksi garam di jual sendiri.

Pemerintah dalam hal ini telah memberikan arahan kepada Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) masing-masing setiap Desa/Lelurahan berdasarakan fungsi dan tugasnya setiap saat dapat melakukan pelaksanaan pelatihan terhadap masyarakat petani khususnya petani garam kapan dan dimana saja melalui Sekolah Lapangan dalam penerapan Pengelolaan Tanah Terpadu (SL-PTT).

Sebagaimana hasil wawancara peneliti yang dilakukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Jeneponto.

Sejauh mana peranan anda selaku Kepala Dinas dalam pemberdayaan masyarakat petani garam dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan;

“Saya selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan telah memberikan tugas kepada lembaga-lembaga terkait agar berperan aktif dan juga memberikan tugas kepada para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di masing-masing Desa maupun Kelurahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya, tentang bagaimana agar para petani garam dapat meningkatkan hasil produksi dan juga memberikan bantuan secara langsung dan arahan-arahan tentang pengolahan garam”.

Apa saja peran anda selama pelaksanaan program tersebut;

“Saya bertugas sebagai Kepala Dinas sekaligus merangkap sebagai Ketua tim koordinator program pelaksana kebijakan dan memberikan wawasan kepada Kelurahan sebagai fasilitator mulai dari sosialisasi, perencanaan program, sampai evaluasi dengan menyerahkan data dan memantaunya,

karena Kelurahan diberi kepercayaan oleh para petani dalam pembinaan sebagai penasehat para petani. (wawancara,KPD, 21 maret 2017)”.

Dilihat dari hasil wawancara di atas, sangat tidak sesuai jika dibandingkan dengan hasil survei peneliti di lapangan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu petani garam sebagai berikut:

Bagaimana peranan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat petani garam yang ada di Kel. Bonto rannu dalam peningkatan produksi dan hasil garam.

”Pemerintah belum sepenuhnya maksimal melakukan peranannya, karna petani masih mendapatkan masalah dalam pengolaan garam dan itu sangat mempengaruhi hasil dan kualitas garam, ditambah faktor cuaca yang dapat menghambat proses produksi. Dimana petani hanya bisa menggarap lahan mereka di bulan-bulan tertentu. (Wawancara,SRP, 22 Maret 2017)”.

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti terhadap petani garam, sangat terlihat jelas bahwa pemerintah belum maksimal melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup para petani garam yang ada di Kel. Bonto Rannu.

Bardasarkan uraian yang ada diatas, Pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi terhadap petani garam agar para petani garam yang ada di Kel. Bonto Rannu dapat meningkatkan hasil dan kualitas garam mereka.

Majunya sebuah daerah karna adanya perhatian khusus dari pemerintah dan apa yang dirasakan masyarakat petani garam yang ada di Kel. Bonto Rannu masih belum maksimal peranan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan tentang peranan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam memberdayakan petani garam di

Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yaitu sebagai berikut;

1. Pembinaan Terhadap Petani Garam

Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan petani garam, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi petaninya. Tujuannya adalah agar perangkat kelurahan dan petani garam tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh pemerintah setempat melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh masyarakat yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan petani. Dalam praktiknya menggunakan konsep kesadaran sendiri dan kemauan dari dalam petani itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan petani yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Dalam hubungannya dengan pembinaan. Diungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak

sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan petani garam harus diubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara petani lainnya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan petani garam. Sebagai kelurahan yang penduduknya sebahagian besar adalah berprofesi sebagai seorang petani, kegiatan-kegiatan dalam pertanian pun dilakukan secara bergotong royong. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat petani garam.

Esensi dari sebuah pencapaian penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan faktor utama untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. Dalam konteks strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat petani garam yang ada di Kel. Bonto Rannu, maka salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah soal kesejahteraan para petani.

Inilah wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat petani garam yang ada di kel. Bonto Rannnu.

Bagaiman peranan pemerintah dalam penyelenggaraan pembinaan untuk pencapaian kesejahteraan masayarakat petani garam di Kel. Bonto Rannu.

“Sejauh ini pemerintah daerah melalui Dinas terkait belum sepenuhnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat petani garam. Para petani garam menjual hasil panennya kepengepul dengan harga yang sangat murah, karena pemerintah belum sepenuhnya menyediakan atau memfasilitasi para petani garam dalam peningkatan hasil produksi. Dan apabila dibiarkan akan

berdampak bagi kesejahteraan para petani dan tentunya sangat merugikan masyarakat petani garam yang ada di Kel. Bonto Rannu.(Wawancara, NY, 23 Maret 2017)”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada petani garam di Kel. Bonto Rannu menyimpulkan bahwa peranan pemerintah dalam perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat petani garam belum sepenuhnya dan masih kurang maksimal. Pemerintah seharusnya lebih proaktif mensosialisasikan pengembangan pemberdayaan masyarakat petani garam di Kel. Bonto Rannu.

2. Pelayanan Dan Pengembangan Terhadap Petani Garam

Pemberian pelayanan yang baik kepada petani garam di Kelurahan Bontorannu diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan petani itu sendiri, dimana paradigma pelayanan petani garam yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus kepada pengelolaan yang berorientasi kepuasan petani. Dilain pihak pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada petani garam diharapkan juga memiliki :

- a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya,
- b. Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan
- c. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat
- e. Memiliki standarisasi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa, masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang

dikehendaki. Adapun bentuk pelayanan pemerintah kepada petani garam di Kel. Bontorannu yaitu apabila petani yang bersangkutan membutuhkan pelayanan misalnya perbaikan dibidang pertanian maka aparat pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

Disamping kemampuan aparatur pemerintah dalam memberdayakan petani garam, besar kecilnya partisipasi petani merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan pertanian sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari petani. Keikutsertaan petani tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di kelurahan. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap petani dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan petani di kelurahan Bonto rannu. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Suatu daerah akan maju jika pemerintah lebih berperan aktif di dalamnya dan apa yang dirasakan oleh masyarakat petani garam di Kel. Bonto Rannu masih sangat jauh dari harapan.

Berikut ini adalah wawancara terhadap petani garam yang ada di Kel. Bonto Rannu yang dilakukan peneliti. Kenapa Petani garam lebih memilih menjual langsung hasil garamnya kepada pengepul.

“Apa bila harus dijual keluar itu membutuhkan biaya tambahan sedangkan kualitas garam kami masih dibawa standar, selain dari pada itu di tambah kebutuhan ekonomi yang harus kita penuhi semuanya itu dari hasil pertanian garam. Bisa saja harga garam kami meningkat jika ditampung

sampai musim penghujan datang, tapi kembali lagi menyangkut kebutuhan sehari hari yang harus dipenuhi dan semuanya itu dari hasil garam.(Wawancara,RS, 23 Maret 2017)”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap petani garam di Kel. Bonto Rannu dapat disimpulkan, bahwa memang peran pemerintah masih belum maksimal dalam menangani masalah yang dihadapi oleh para petani garam. Seharusnya pemerintah lebih berperan aktif dan memberikan solusi untuk para petani, agar para petani garam di Kel. Bonto Rannu dapat meningkatkan hasil garam mereka dan dapat bersaing dengan garam yang ada di daerah lain untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat petani garam di Kel. Bonto Rannu.

Kali ini wawancara yang dilakukan penulis terhadap Petani garam yang menganggap pengepul merupakan salah satu solusi dari masalah yang dihadapi. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu petani garam sebagai berikut:

“Biasanya petani meminjam dana awal dengan perjanjian setelah petani garam panen langsung dijual ke pengepul. Selain itu petani juga merasa terbantu walaupun harganya jauh lebih murah, dan biasanya pengepul menampung garam yang mereka beli dari para petani dan kemudian dijual kembali apabila harga garam sudah tinggi, karna garam lebih tinggi harganya dimusim hujan.(Wawancara,TO,24 Maret 2017)”.

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti, sangat jelas terlihat dimana masyarakat sangat membutuhkan peranan dan bantuan dari pemerintah agar petani garam tidak lagi bergantung pada pengepul (tengkulak).

3. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah

Pelatihan diberikan untuk membekali petani garam agar menghasilkan produktivitas garam dengan kualitas terbaik. Pelatihan dilakukan di Kelurahan Bonto rannu, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto maupun terjun langsung di lapangan /tambak garam petani. Pemberian materi pelatihan dilakukan oleh insinyur ahli pergaraman, tim pendamping, ataupun petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto dan tidak jarang pula petani garam yang memiliki pengetahuan lebih di bidang pergaraman untuk memberikan ilmu kepada sesama teman. Pelatihan dihadiri petani garam, tim fasilitator, petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto dan perangkat Desa Jeneponto setempat Pelatihan dihadiri petani garam, tim fasilitator, petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto dan perangkat Desa Jeneponto setempat.

Pelatihan merupakan salah satu pelaksanaan kebijakan yang diterapkan di kelurahan bonnto rannu. Dalam rangka meningkatkan kemampuan petani garam, pelatihan yang diberikan untuk membekali dan memberikan kejelasan petani garam dalam meningkatkan pengetahuan, pengelolaan dan menghasilkan produktivitas garam dengan kualitas terbaik. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak RS selaku petani garam sebagai berikut:

“Pelatihan sudah diberikan kepada petani karena peningkatan produksi merupakan salah satu hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pelatihan, karena dengan pelatihan bisa menjadi salah satu langkah efektif agar kami para petani bisa lebih paham dan mengerti dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam cara pengolaan garam untuk meningkatkan hasil produksi”.

Pelatihan peningkatan produksi dan kualitas sudah beberapa kali diberikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto. Pelatihan biasanya diisi

oleh insinyur di bidang pergaraman, dan dihadiri fasilitator, petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan para petani garam. Menurut Bapak SR selaku petani garam menjelaskan sebagai berikut:

Pelatihan sudah diberikan kepada kami para petani sebagai salah satu program kebijakan dari pemerintah. Pemberian pelatihan ini sangat memberikan manfaat bagi petani garam, salah satunya saya yang turut merasakan setelah dilaksanakan pelatihan dari tim ahli dan insinyur pergaraman saya merasa mendapatkan ilmu yang bisa saya terapkan terhadap masalah yang saya hadapi selama ini. (Wawancara).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui yang dilakukan peneliti kepada petani garam, setelah diberikan program berupa pelatihan, petani garam merasa mendapatkan bekal yang cukup dalam pengelolaan garam. Selain itu, insinyur dan tenaga ahli lainnya juga memberikan bekal ilmu dan pengetahuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi petani garam.

Pelatihan yang diberikan di Kelurahan Bontorannu meliputi

- a. Pelatihan peningkatan produksi, diberikan untuk memberikan pengetahuan kepada petani garam agar dapat menghasilkan garam secara maksimal.
- b. Pelatihan peningkatan kualitas, memberikan motivasi, pengetahuan dan membuka cakrawala petani garam agar kualitas yang dihasilkan tidak hanya KP 3 (85,12 %), tetapi meningkat menjadi KP 2 (NaCl 92,3 %).
- c. Pelatihan penggunaan teknologi pergaraman, untuk membekali pengetahuan menggunakan teknologi pergaraman terbaru agar garam yang dihasilkan petani garam lebih berkualitas dan produksi lebih tinggi.
- d. Pelatihan kemitraan garam, untuk membekali petani garam tentang cara-cara memasarkan garam dengan harga tinggi sehingga memiliki hubungan yang baik dengan tengkulak maupun pabrik garam industri.

Untuk meningkatkan taraf hidup petani garam yang ada di Kel. Bonto Rannu peran pemerintah sangat dibutuhkan disini, pemerintah harus mampu memberikan solusi untuk para petani agar hasil panen garam petani tidak dijual murah ke pengepul. Bagaimana petani bisa dapat bersaing dengan petani garam didaerah lain jika peranan pemerintah tidak maksimal atau kurangnya perhatian kepada masyarakat petani di Kel. Bonto Rannu, Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.

4. Peningkatan Kualitas Garam

Kualitas garam yang baik memang sangat diharapkan petani garam. Hal ini merupakan masalah yang serius dalam pembuatan garam. Salah satu tujuan dari dilaksanakannya program adalah meningkatkan kualitas garam karena mengingat keberadaan kualitas petani garam di Kelurahan Bontorannu selama ini masih tergolong rendah dan tidak ada solusi dalam menghasilkan garam berkualitas baik, karena sebelum adanya program tersebut belum ada sentuhan dari pemerintah. Permasalahan tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan petani garam yang ada di kelurahan bontorannu. Kurangnya pengetahuan petani menyebabkan produksi garam yang didapatkan cenderung sedikit, bahkan tidak ada peningkatan yang signifikan. Selain itu, minimnya teknologi pergaraman membuat petani garam menggunakan teknologi hasil warisan pendahulu-pendahulunya yang cenderung masih tradisional. Indikator garam yang berkualitas baik adalah berwarna putih, berukuran besar dan memiliki kandungan NaCl 92% (KP 2). Akan tetapi, selama ini kualitas petani garam hanya mampu menghasilkan garam dengan kualitas garam para petani masuk dalam KP 3 (jelek) dengan indikator kadar air 7,65 %, kadar NaCl 85,12

%, berwarna kusam, ukuran kristal sedang, dan homogenitas yang tidak seragam.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak RS petani garam sebagai berikut:

“Dulu kualitas garam produksi kami termasuk jelek masuk dalam kualitas 3, Warna yang kusam dan sedikit kemerahan, terkadang ditimbun beberapa tahun malah berubah menjadi juga merah. Ketidak tahuan dalam menghasilkan garam yang bagus maka petani memanfaatkan program pemberdayaan, meskipun tidak masuk ke KP 2 tetapi sekarang lumayan putih.

Hasil produksi garam dengan kualitas rendah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi petani garam kelurahan bontorannu selama ini. Melihat permasalahan kualitas yang dihadapi, pemberdayaan difokuskan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan. Hal tersebut merupakan salah satu program yang dibentuk dengan tujuan menambah wawasan petani garam agar kualitas garam meningkat secara signifikan. Demikian disampaikan salah satu petani garam Bapak NY selaku penerima PNPM PUGAR sebagai berikut:

“Kalau dulu warnanya gelap dan berukuran kecil dan masuk ke KP 3 (jelek), kalau sekarang saya semakin mengerti saat pendampingan yang didatangkan dari dinas Kelautan dan Perikanan. Saat ini ya Alhamdulillah karena kualitas garam lumayan putih dan besar-besar sehingga menjadi jauh lebih baik dri sebelumnya”.

Penjelasan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak SR selaku penerima PNPM PUGAR sebagai berikut:

“Sekarang kualitas garam semakin bersih, ternyata dulu ada yang tidak saya tidak ketahui dari pembuatan garam seperti saat menggaruk dan usia panen. Setelah adanya pelatihan dan pendampingan semakin tahu kalau semakin lama masa panen bisa meningkatkan kualitas garam. Selain itu, ukuran garam juga bisa semakin besar”.

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan kualitas terlihat dari penjelasan petani garam bahwa setiap kebijakan tidak akan berjalan

mulus tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat. Begitupun kebijakan PNPM PUGAR yang disampaikan kepada petani garam agar mereka mengetahui program-program yang dilaksanakan. Adanya pendampingan dari tim ahli, pelatihan dan peralatan memadai yang diberikan di Kelurahan Bontorannu dapat meningkatkan kualitas garam dengan menggunakan PNPM PUGAR lebih putih, kristal garam lebih besar.

5. Peningkatan Produktivitas Garam

Produktivitas petani garam yang ada di Kelurahan Bontorannu selama ini cukup memprihatinkan dan tidak sedikit petani garam menghasilkan garam dengan jumlah produksi yang sama setiap musimnya. Produksi yang rendah dikhawatirkan akan merugikan petani garam, sedangkan produktivitas yang tinggi nantinya dapat membawa keberhasilan pada petani garam. Seperti yang diungkapkan Bapak RS selaku penerima PNPM PUGAR dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Saya termasuk salah satu petani garam pemula, dari tahun ke tahun produksi saya sangat menurun, hal ini dilatarbelakangi berbagai aspek di samping cuaca, saya juga kurang memiliki keahlian dalam mengolah garam sehingga garam yang saya hasilkan sangat sedikit. Sekarang cukup terbantu adanya PNPM PUGAR secara langsung maupun tidak langsung ada kenaikan meskipun hanya sedikit”.

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PNPM PUGAR yang diberikan oleh pemerintah di Kelurahan Bontorannu terdapat tim pendamping dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Pendampingan diberikan kepada petani garam yang terdaftar sebagai PNPM PUGAR. Petani garam sangat

memanfaatkan proses sosialisasi dan pendampingan untuk bertukar informasi sehingga menambah wawasan dalam pembuatan garam.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Di Kelurahan Bonto Rannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengeruhi. Dan hambatan yang muncul pada program pemberdayaan msyarakat petani garam antara lain :

1. Kualitas Sumber daya manusia pemerintah daerah

Sebagaimana terlihat sumber daya manusia atau aparatur yang bertugas pada organisasi kantor tersebut secara kuantitas jumlah pegawai yang ada pada kantor Kelurahan Bonto Rannu sudah cukup, namun secara kualitas sumber daya aparaturnya belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan kerja dan mengkoordinir program di Kelurahan yang masih terlihat kurang.

Berikut ini adalah wawancara yang dilakukan peneliti terhadap petani garam yang ada di Kel. Bonto Rannu.

Apa pendapat anda tentang program kebijakan Pemerintah yang ada pada saat ini;

”Program pemerintah yang ada pada saat ini bisa dikatakan menjadi salah satu masalah yang di alami petani garam, karena dilihat dari adanya rasa kecemburuan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat petani, dulu semua rukun-rukun saja karena tidak ada yang mendapat bantuan semua sama rata sama rasa, tapi setelah program dilaksanakan, kecemburuan sosial antara petani mulai nampak, karena bantuan diberikan secara bergantian setiap tahunnya kecemburuan sosial juga terjadi di sebabkan karena adanya sikap para petani yang ingin mendapatkan bantuan tanpa memikirkan masyarakat petani yang lain, sedangkan para petani mengharapkan pencairan dana bantuan di bagikan secara bersamaan dan

menyeluruh, dan saya rasa wajar saja karena kami para petani takut tidak mendapatkan dana bantuan dari program pemerintah. (Wawancara, NY, 23 Maret 2017)”.

NY yang sudah bekerja sebagai petani garam selama lebih dari 20 tahun juga menguatkan adanya perbedaan pandangan yang menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial. Hal ini disebabkan adanya sikap para petani garam yang ingin mendapatkan bantuan tanpa mamikirkan para petani yang lain sehingga mereka ingin sesegera mungkin mendapatkan dana bantuan tersebut untuk memulai proses pembuatan garam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap petani garam menunjukkan bahwa setiap penerapan kebijakan pasti akan sulit dipisahkan dari perbedaan antar masyarakat.

2. Pendampingan Permasalahan Teknis Pembuatan Garam

Pendampingan merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pemberdayaan petani garam. Fasilitator bertugas mendampingi petani selama berlangsungnya waktu pembuatan garam dalam pelaksanaan sesuai dengan buku pedoman, selama ini pendampingan yang diberikan cukup bagus, termasuk pendampingan sosialisasi dan administrasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan juga terdapat permasalahan dalam pemberian pendampingan, petani garam kurang mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami, terdapat perbedaan pola pikir antara petani garam dengan tim pendamping yang memberikan materi untuk mendukung peningkatan produksi garam.

Berikut ini wawancara yang dilakukan peneliti terhadap petani garam, menyangkut harapan para petani di Kel. Bonto Rannu kedepannya terhadap pemerintah Daerah serta Dinas terkait.

Apa harapan petani kedepannya terhadap pemerintah Daerah dan Dinas terkait;

“Harapan petani kepada pemerintah kedepannya agar bagaimana pemerintah lebih meningkatkan peranannya dan perhatiannya kepada masyarakat petani, dan segera memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi petani garam, agar para petani mendapat meningkatkan untuk menghasilkan produktivitas garam dengan kualitas terbaik (Wawancara, 24 Maret 2017)”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sangat jelas menunjukkan bahwa petani garam sangat merasakan dampak permasalahan penghasilan yang cenderung pas-pasan. Maka dari itu petani sangat mengharapkan rutusnya diadakan penyuluhan dan pelatihan agar para petani garam yang ada di Kelurahan Bonto rannu dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik serta dapat meningkatkan pendapatan agar tetap bisa melanjutkan usaha pembuatan garam.

Selain itu, permasalahan kontur lahan petani yang berbeda-beda tetapi praktiknya disamakan, sehingga tidak semua petani garam memahami saat mempraktikkan di lahan garam masing-masing. Peneliti menemukan sebelum pelaksanaan kebijakan, tim fasilitator diberikan kepercayaan untuk mendampingi petani sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan, tetapi setelah kebijakan terlaksana fasilitator kurang maksimal dalam mendampingi, sering kali menyamakan permasalahan petani, sedangkan petani memiliki permasalahan yang berbeda-beda sehingga petani merasa kebingungan dalam mempraktikkan.

Tujuan awal dilaksanakannya pendampingan sendiri diharapkan dapat memberikan solusi bagi ketidaktahuan petani garam dalam mengelola lahan. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pendampingan tersebut tidak sesuai dengan semestinya, terdapat dampak negatif yang terjadi dimana tim pendamping menyamakan permasalahan teknis yang dialami petani garam. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak RD selaku petani garam yang merasakan masih kurangnya pendampingan yang diberikan kepada petani.

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pendampingan menyamakan permasalahan yang dihadapi petani garam hal ini dikarenakan kurangnya kesepahaman pola pikir yang diberikan oleh fasilitator sehingga saat pendampingan tim fasilitator merasakan kesulitan untuk menyamakan persepsi para petani garam sehingga para petani masih merasa kebingungan.

Setiap orang pasti menginginkan kehidupannya serba kecukupan, itupun yang ingin dirasakan oleh para petani garam, Kesejahteraan akan dapat dirasakan petani garam jika pemerintah melakukan peranannya dengan baik, suatu daerah tidak akan dapat berkembang jika pemerintah tidak berperan aktif didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap program PUGAR di Kabupaten Jeneponto berada pada kategori efektif meskipun masih terdapat beberapa kekurangan seperti pembentukan tim koordinator lapangan kurang efektif karena kurangnya kerjasama antara koordinator penyuluh lapangan dengan petani garam sehingga tidak terlalu berpengaruh dalam menjalankan program. Pendampingan juga kurang efektif dirasakan manfaatnya oleh petani garam karena keterbatasan tenaga pendamping khususnya pendamping teknis, serta belum efektif atau kurang efektif dalam peningkatan kualitas garam. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Perlu mendorong Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dan menambah tenaga pendamping teknis. Agar kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong terlebih dibidang pertanian dimana masyarakat sebelum musim kemarau tiba, perlu membangun tempat penampungan air.

Peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada petani garam seperti dalam kegiatan disektor pertanian maka kontribusi yang sangat besar dalam bidang pertanian adalah aktivitas usaha tani. Aktivitas usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat petani garam khususnya di Kelurahan

Bontorannu dapat dilakukan melalui aktivitas usaha garam. Aktivitas usaha tani garam sangatlah beragam mulai dari cara pengolahan tanah, pembersihan, bahkan sampai pada proses hasil panen.

Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan petani garam terdiri atas factor pendukung, yaitu : Kekuasaan, system pendidikan formal yang maju, system terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat, adanya orientasi untuk maju, serta adanya sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Peranan Pemerintah terlebih khusus Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan terhadap pemberdayaan petani gaaram di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto hendaknya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
2. Perlu dilakukan pengawasan yang secara rutin terutama terhadap kegiatan petani garam yang menunjukkan adanya kegiatan pengembangan produktivitas.
3. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat kelurahan guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi petani garam.

4. Melalui hasil penelitian ini disarankan hendaknya pemerintah melalui dinas Dinas Kelautan Dan Perikanan, memberikan perhatian secara sungguh-sungguh bagi para petani dalam membina dan membantu para petani dalam proses kesinambungan usaha mereka.
5. Hendaknya pemerintah diharapkan meningkatkan harga dasar jual sesuai mutu dan kualitasnya agar ada upaya dari petani untuk meningkatkan kualitas produksinya, sehingga pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan jerih payah petani.

DAFTAR PUSTKA

- Achmadi. A., Narbuko. C. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adi, I.R. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Ambar Teguh Suistiyani. 2004, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arisandi.1966. *Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: GayaMedia.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. (2007). *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Elex Meia Komputindo.
- Friedman. 1998. *Kemitraan Suatu Aliansi Strategi*(Makalah). Tidak Diterbitkan, Puspensos Depsos RI. Jakarta.
- Hendrarso, Emy Susanti dalam Bagong Suyanto & Sutinah (ed).2005.*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Himawan.2003. *Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Potensi Masyarakat Petani melalui Perpustakaan Umum Sederhana*.
- Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irwanto.dkk.2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Indonesia : sebuah desk- review*. Dalam <http://www.ausaid.gov.au/Publications/Documents/pwd> sitbahasa. pdf diakses pada tanggal 02 juli 2013.
- Kamil, M. 2010. *Konsep Dasar dan Pokok-pokok Pembangunan Berwawasan Gender*.[http://file.upi.edu/direktori/SPS/PRODI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH/196111091987031-MUSTOFA KAMIL/Bahan Kuliah/KONSEP DAsar Gender.pdf](http://file.upi.edu/direktori/SPS/PRODI_PENDIDIKAN_LUAR_SEKOLAH/196111091987031-MUSTOFA_KAMIL/Bahan_Kuliah/KONSEP_DAsar_Gender.pdf). Diakses 23 Desember 2013
- Kartasasmita, Ginanjar.1997,*Administrasi Pembangunan PerkembanganPemikiran dan Praktiknya di indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Ketaren. 2008. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Ambon: GeMMA Press.Nikijuluw, V. P. H. 2001.

- Lintang, Y. 2013. "Program pengembangan garam industri." Lokakarya Nasional Indonesia menyongsong u Swasembada Garam Industri 2015, Depok.
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narayan, D. 2002. *Empowerment and Poverty Reduction*. Washington, DC: The World Bank.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez, 2003. *The Integration of Social Work Practice*. Wadsworth, Inc., California
- Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2013.
- Raharjo. (2002). Buku Panduan: *Pengembangan Usaha Terpadu Garam dan Artemia, Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan*, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Soejono Soekanto, 1982. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, <http://google.com>, tanggal 12 juni 2010.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Suriadi. 2005. *Strat7-egi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora: Bandung.

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Papan Pengenal Kantor Didas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto



Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto



Gambar 3 Wawancara dengan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto.